

ABSTRAK

Pada umumnya putusan cerai talak hanya mengabulkan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon sesuai dengan permohonan pemohon tanpa menghukum kepada pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajibannya sebagai akibat cerai talak seperti kewajiban memberi *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak sehingga hak-hak istri terabaikan sementara seorang hakim tidak boleh memberikan putusan yang melebihi apa yang diminta (*ultra petita partium*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun seorang hakim mempunyai hak *ex officio* yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya. Bertujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri ketika terjadi cerai talak. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan membahas penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak studi kasus di Pengadilan Agama Brebes dengan putusan register Nomor 0231/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 26 Februari 2018.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri 3 permasalahan, yang pertama apakah setiap putusan cerai talak telah terpenuhi hak-hak istri, kedua bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes mengenai hak *ex officio* dalam perkara cerai talak, dan ketiga bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 0231/Pdt.G/2018/PA.Bbs. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data primer diperoleh dari wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat dimana pihak termohon (istri) tidak mengajukan gugatan rekonsvansi pada saat persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri dinyatakan nusyuz oleh hakim, istri dalam keadaan qobla dukhul, istri merelakan untuk tidak diberikan hak-hak tersebut dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebankan kewajiban tersebut. Selanjutnya hak *ex officio* yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Brebes didasarkan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

kata kunci: Hak *ex officio* dan cerai talak.

ABSTRACT

In general, irrevocable divorce decisions only grant the applicant by giving permission to the applicant to drop the divorce one raj'i to the petitioner in accordance with the petitioner's request without punishing the applicant for giving his obligations as a result of irrevocable divorce such as the obligation to give mut'ah, living iddah and living children so that their rights are neglected while a judge may not give a decision that exceeds what is requested (*ultra petita partium*) as stated in Article 178 paragraph (3) HIR. However, a judge has *ex officio* rights, namely the right that the judge has because of his position. Aims to protect the rights of ex-wives when irrevocable divorces occur. So the author is interested in researching and discussing the application of *ex officio* judge rights in irrevocable divorce cases in the Brebes Religious Court with a verdict number 0231 / Pdt.G / 2018 / PA.Bbs dated 26 February 2018.

The formulation of the problem in this thesis consists of 3 problems, the first whether every irrevocable divorce decision has fulfilled the rights of the wife, secondly how the Brebes Religious Court judges regarding *ex officio* rights in irrevocable divorce cases, and third how the Judges' judgment in applying *ex officio* rights in irrevocable divorce cases the Brebes Religious Court's decision Number 0231 / Pdt.G / 2018 / PA.Bbs. The research method used in this study is a sociological juridical research method. In supporting and completing secondary data, field research is conducted to obtain primary data. Primary data obtained from interviews. The research specifications used are descriptive analysis, namely research that aims to provide a detailed description.

The results of this study can be concluded that the judge uses *ex officio* rights at the time when the defendant (wife) did not file a reconciliation claim during the trial regarding his rights after the divorce. However, the *ex officio* rights cannot be used by the judge if the wife is declared nusyuz by the judge, the wife is in a state of qobla dukhul, the wife gives up not to be granted these rights and the husband does not have the economic capacity to be charged. Furthermore, *ex officio* rights applied by the judge of the Brebes Religious Court are based on Article 41 letter c of Law Number 1 Year 1974 jo Article 149 and Article 152 Compilation of Islamic Law.

Key words: *Ex officio* rights and irrevocable divorce.